

**EFEKTIVITAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN  
KAIMANA DALAM MENGELOLA INFORMASI PUBLIK**

Khofifah Hidayati Furu

NPP. 29.1894

*Asdaf Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat*

*Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email: khofifahfuruada@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** To lead to good governance, the government with the approval of the DPR issued Law Number 14 of 2008 regarding Public Information Disclosure. **Objectives:** This research is focused on looking at the effectiveness of the communication and informatics office of Kaimana Regency in managing public information. collusion and nepotism by increasing the transparency and accountability of public institutions. **Methods:** This study used a qualitative descriptive method with an inductive approach. Then draw conclusions, general problem solving using interviews, observations, and documentation as data collection instruments. The research conducted by the author shows that the management of public information at the Communication and Information Office of Kaimana Regency is still lacking in meeting the needs of adequate human resources and the lack of controlling carried out by the Communication and Information Office of Kaimana Regency in addressing the problems encountered by other agencies in managing the website. **Conclusion:** The effectiveness of the Kaimana Regency Communication and Information Office has not been fully effective. This can be seen from the research conducted by the researcher, it can be seen that there is a lack of meeting the needs of adequate human resources and the lack of controlling carried out by the Communication and Information Office of Kaimana Regency in addressing the problems encountered by other agencies in managing the website.

**Keywords: Effectiveness, Management, Public Information.**

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Untuk mengarah *good governance*, pemerintah terhadap persetujuan DPR menerbitkan UU Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. **Tujuan:** Penelitian ini di fokuskan untuk melihat keefektivitasan dinas komunikasi dan informatika kabupaten kaimana dalam mengelola informasi publik tujuannya guna membentuk layanan masyarakat yang semakin mudah, cepat, efektif dan efisien guna mendorong *good governance* dengan teknologi yang memudahkan rakyat menarik informasi sehingga bisa memperkecil praktek korupsi, kolusi dan nepotisme secara menaikan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Selanjutnya menarik kesimpulan, pemecahan masalah bersifat umum dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data. Penelitian yang dilakukan penulis, bahwa pengelolaan informasi public di Dinas komunikasi dan informatika kabupaten kaimana masih kurangnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang mencukupi dan kurangnya *controlling* yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kaimana dalam menyikapi permasalahan yang ditemui dinas lain dalam mengelola *website*. **Kesimpulan:** Efektivitas yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan peneliti terlihat kurangnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang mencukupi dan kurangnya *controlling* yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana dalam menyikapi permasalahan yang ditemui dinas lain dalam mengelola *website*.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pengelolaan, Informasi Publik.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “*Kubernan*” dalam bahasa Indonesia “Nahkoda Kapal” yang artinya menatap kedepan (Surbakti, 1992 : 5). Dari arti kata tersebut kita dapat mengetahui tugas seorang nahkoda adalah membawa kapal agar dapat sampai ke tujuan. Jadi, tugas Pemerintah adalah menuntun dan membawa rakyat untuk mencapai tujuan negara. Teknologi mengalami perkembangan yang pesat saat ini karena seluruh aktivitas yang menggunakan tenaga manusia atau manual mulai beralih ke pekerjaan yang menggunakan tenaga mesin atau dilaksanakan secara digital atau yang lebih dikenal dengan *e-government*. Maka diberlakukan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *egovernment*. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik yang disebut *egovernment*. Pada Tahun 2012 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke membangun jaringan yang terintegrasi untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Merauke. Selain terfokus

pada akses internet jaringan juga dimanfaatkan untuk keperluan jaringan lokal berupa penggunaan aplikasi kantor yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Merauke. Dengan adanya Infrastruktur Jaringan yang baik maka penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *e-government* dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut Bidang Pengembangan Layanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke membuat aplikasi *e-access* yang dikhususkan untuk Pegawai. Aplikasi *e-access* adalah aplikasi manajemen user hotspot terpusat yang dikhususkan untuk digunakan oleh pegawai pemerintah. *Eaccess* dapat digunakan untuk *log in hotspot* di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Merauke yang terdapat perangkat *Wireless Fidelity* (Wifi).

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pelayanan *e-access* masih mengalami kendala yaitu masih ada pegawai yang belum terdaftar ke jaringan *e-access*. Hal ini dilihat dari 4997 pegawai (BKD Kabupaten Merauke, 2021) sebanyak 3787 pegawai (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke, 2022) sudah terdaftar tetapi sebanyak 1001 pegawai belum terdaftar pelayanan *e-access*, jaringan yang disediakan *e-access* masih mengalami gangguan yang menyebabkan hilangnya koneksi jaringan, belum terdapat layanan *call center* atau layanan pengaduan sehingga saat pegawai mengalami masalah harus melapor secara manual ke kantor dan masih terdapat pegawai yang kehilangan *password* sehingga tidak dapat *log in* ke jaringan menggunakan *e-access*.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya digunakan peneliti selaku bahan pedoman menjalankan sebuah penelitian maka peneliti bisa memperbanyak teori yang digunakan pada studi ini serta menjadi bahan perbandingan sehingga dapat menghindari kesamaan dengan penelitian terdahulu. Berikut merupakan hasil-hasil. Pemanfaatan media sosial oleh pemerintah kota medan ketika menangani berita hoax terkait penyebaran virus corona yang sering terjadi ditengah masyarakat sehingga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi pada kota medan dengan memberikan sosialisasi corona virus pada akun media sosial. Efektivitas komunikasi humas pemerintah kabupaten jenepono yang bertujuan agar segala informasi yang dimiliki pemerintah daerah dapat dilihat dan tersampaikan langsung oleh seluruh masyarakat jenepono sehingga antara masyarakat dan pemerintah jerepono dapat berjalan secara bersamaan. Dalam peningkatan pemanfaatan media sosial yang pada saat ini dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan keunggulan (SDM) yang memahami jika media sosial berfungsi sangatlah krusial guna mendorong perbaikan dari sebuah sistem kerja dengan efektif dan efisien secara memakai media sosial twitter yang dimanfaatkan oleh Ganjar Pranowo Pemanfaatan media sosial terhadap eektivitas komunikasi sehingga informasi yang dimiliki pemerintah daerah dapat tersampaikan langsung dan meminimalisir berita hoax yang terjadi di dalam masyarakat.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai pengelolaan informasi public Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kaimana. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan serta hambatan pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten kaimana dalam mengelola informasi publik dan upaya untuk mengatasi permasalahan yang terdapat pada Dinas komunikasi dan informasi Kabupaten Kaimana.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut Lofland dan Loftland (dalam Moleong, 2011:157) menyebutkan jika “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan Tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif penulis melakukan wawancara terhadap 4 orang yang dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari 4 informan yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana, Kabid Disemasi dan Informasi, Kabid Telematika, dan 1 Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana. Adapun analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman (1992:16) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas yang dilakukan melalui *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/Verifiaction* (Penarikan Kesimpulan).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis permasalahan mengenai efektivitas dalam pengelolaan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kaimana dengan menggunakan teori menurut Duncan dalam Ricard M. Steers (1985:53) dimana permasalahan dalam efektivitas dapat diukur dengan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

### **3.1 Pencapaian Tujuan**

#### **1. Terpenuhinya Informasi Publik yang dibutuhkan masyarakat dalam sosial media dan website**

Salah satu fungsi utama media sosial dan website pemerintahan Kabupaten Kaimana adalah sebagai sarana penyebaran informasi publik yang mudah dan canggih mengikuti perkembangan zaman. Kepala Bagian Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kaimana juga berpendapat bahwa website dinas yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kaimana sangat membantu mereka dalam memberikan informasi terbaru kepada masyarakat terutama dalam melaksanakan tugas utama Disperindag yaitu menyebarkan perkembangan harga pasar kepada masyarakat. Dengan website yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana untuk dapat dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kaimana sangat membantu menyebarkan informasi dengan lebih efektif.

#### **2. Content dalam media sosial dan *website* mampu menunjang pencapaian visi misi, tujuan dari pemerintah**

Dapat terlihat dari visi dan misi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kaimana bahwa Pemerintah Kabupaten Kaimana ingin melanjutkan penataan birokrasi pemerintahan agar lebih responsif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang berbasis e-government. Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabel sebuah e-government dapat dicapai dengan menggunakan website pemerintahan.

#### **3. Menghemat waktu dan biaya masyarakat dalam berkomunikasi dengan pemerintah**

Berdasarkan perkataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana tersebut, bahwasanya penggunaan media sosial dan website pemerintah Kabupaten Kaimana ini dapat mengurangi waktu, tenaga dan biaya yang digunakan masyarakat untuk mengakses sebuah informasi. Melalui website pemerintah Kabupaten Kaimana masyarakat tidak perlu mengunjungi dinas maupun perangkat daerah secara langsung untuk mendapatkan informasi maupun pelayanan yang dibutuhkan. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam mengurangi biaya dan tenaga dengan mengakses media sosial dan website dari rumah ataupun tempat-tempat lainnya.

### **3.2 Integrasi**

#### **1. Sosialisasi keberadaan *website* sebagai media informasi dan komunikasi**

Sosialisasi merupakan kegiatan memberikan edukasi berupa pengetahuan terhadap sesuatu hal dimana dapat menambah pengetahuan masyarakat sehingga

dapat mengubah sebuah kebiasaan. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pengelolaan informasi sudah melakukan berbagai sosialisasi terutama mengenai media sosial dan website pemerintahan Kabupaten Kaimana baik di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kaimana sudah melakukan berbagai sosialisasi mengenai e-government terutama website kepada sesama agen pemerintah maupun masyarakat sbagai bentuk usaha dalam mengubah kebiasaan lama masyarakat menjadi sebuah kebiasaan baru yang lebih efektif.

## **2. Terciptanya koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain maupun institusi lain**

Untuk mencapai sebuah efektivitas dalam memberikan keterbukaan informasi publik diperlukan adanya sebuah koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan media sosial dan website organisasi perangkat daerah terkait. Dinas Komunikasi dan Informatika sudah melakukan berbagai koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam pengelolaan informasi public dan juga dengan insntansi lainnya non pemerintahan dalam rangka berkerja sama dalam pengadaan tower signal di Kabupaten Kaimana. Koordinasi yang dilakukan juga dalam waktu yang bersamaan dapat membawa keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah.

### **3.3 Adaptasi**

#### **1. Kecukupan jumlah sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan media sosial dan *website***

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana berpendapat bahwa permasalahan kekurangan sumber daya manusia yang memadai bukan hanya terjadi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana tetapi juga terjadi pada organisasi perangkat daerah lainnya. Banyak *website* ataupun aplikasi *e-government* lainnya yang kurang mendapatkan perhatian oleh dinas terkait dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap hal teknologi dan informatika. Kekurangan ini yang menyebabkan kurangnya manajemen *egovernment* yang ada pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Kaimana.

#### **2. *Website* yang menarik (navigasi mudah, content yang berkualitas, waktu dalam menampilkan satu halaman penuh, keamanan/privacy).**

*Website* pemerintahan Kabupaten Kaimana sudah memiliki desain yang menarik dan mudah dipahami sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berupa informasi publik maupun layanan lainnya. Keamanan yang dimiliki oleh *website* dinas juga tergolong baik mengingat belum pernah ada terjadi kebobolan *hack* situs pemerintahan Kabupaten Kaimana oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan *statement* Kepala Seksi pengelolaan data dan informasi Kabupaten Kaimana yang

berpendapat bahwa sejauh ini pengelolaan keamanan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana sudah baik, dikarenakan sampai saat ini belum pernah terjadi hal seperti kebobolan data oleh *hacker* atau sebagainya. Beliau berpendapat bahwa hal ini terjadi atas kemungkinan 2 hal manajemen privasi yang baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana yang baik ataupun belum ada yang mencoba untuk menjebol keamanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana maupun *website* organisasi perangkat daerah lainnya.

### **3. Kecukupan sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan e-government**

Berdasarkan pernyataan dalam LAKIP, bisa di ketahui jika fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana sangat terbatas. Sebagai sebuah lembaga yang bertugas pada bidang teknologi dan informatika sarana dan prasarana berupa perangkat keras seperti komputer, laptop ataupun perangkat keras yang menunjang teknologi lainnya merupakan sebuah kebutuhan yang vital. Keterbatasan sarana dan prasarana ini yang kemudian menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana. Pernyataan dalam LAKIP juga didukung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana yang berasumsi jika bahwa kekurangan infrastruktur fasilitas yang dipunyai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana yakni salah satu permasalahan utama yang dimiliki dinas dalam *e-government*. Kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana antara lain seperti perangkat berupa *personal computer*, laptop dan sarana kantor yang telah tua dan keadaan yang kurang baik.

#### **3.4 Diskusi Temua Utama Peneliti**

Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam hal ini Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Kaimana Merupakan sarana pelayanan informasi publik bagi masyarakat di Kabupaten Kaimana dimana keterbukaan informasi harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kaimana guna untuk mempermudah masyarakat dalam urusan pelayanan pemerintahan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pengelolaan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana sudah terlaksana dengan baik namun masih perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut terjadi karena, Efektivitas yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan peneliti terlihat kurangnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang mencukupi dan kurangnya *controlling* yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana dalam menyikapi permasalahan yang ditemui dinas lain dalam mengelola *website*.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam pelaksanaan penelitian hanya dilakukan kurang lebih 14 hari.

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work).** Penulis memfokuskan hasil penelitian pada efektivitas Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Kaimana dalam mengelola informasi publik. Diharapkan dapat bermanfaat dan berguna kepada pemerintah daerah atau Dinas terkait untuk meningkatkan efektivitas Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kaimana dalam mengelola informasi publik.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, kepada Dosen Pembimbing Ibu Dr. Ika Sartika M,T dan Bapak Dedhy Guntoro, SE, MM yang telah memberikan bimbingan dalam pelaksanaan penelitian dan juga kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang sudah bersedia dan mendidik serta memberikan ilmu kepada penulis.



## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Arikunto, Suharsini. 2010. "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 2010)."

Darmawan, Deni, and Kunkun Nur Fauzi. 2013. "Sistem Informasi Manajemen." van Dijck, José. 2013. "The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media."

Gibson, James L, John M Ivancevich, and J Donnelly. 1995. "Organisasi: Perilaku Struktur Proses."

Mardiasmo. 2004. "Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah."

Moleong, Lexy J. 2005. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)."

Nasrullah, Rulli. 2015. "Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi."

Sabarno, Hari. 2007. "Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa."

Steers, R M. 2014. "Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)= Organizations Effectiveness ."

Sugandi, Y. 2011. "Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu Di Indonesia."

Ugm, Lemhanas Program Studi Ketahanan Nasional Pascasarjana, Ichlasul Amal, and Armawi. 1996. "Keterbukaan Informasi Dan Ketahanan Nasional."

### **Skripsi**

Qaidi Qhisti (2020). Pemanfaatan Media Sosial Oleh Pemerintah Kota Medan Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Hoax Tentang Berita Hoaks Tentang Virus Corona.

Santi Nawanti (2020). Efektivitas Komunikasi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam menyebarkan informasi pembangunan Daerah

Susminto, Ahmad, Dkk (2020) Pemanfaatan Media Sosial Twitter Oleh Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil

Wahmad Setiadi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi